

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016 diukur sesuai yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan berdasarkan kriteria secara ringkas seperti yang dijelaskan pada BAB II. Mekanisme pengumpulan data kinerja dilakukan sesuai dengan keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.04.2.21.08.16.3115 tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di BPOM.

Pencapaian Sasaran strategis/ kegiatan BAIK (100%) adalah : 1. Sasaran kegiatan: Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi. 2. Sasaran kegiatan : Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	Pencapaian Sasaran strategis/ kegiatan KURANG (67,7%) adalah : 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
---	---

Capaian masing-masing indikator dari setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	6	0	0%	 Kurang (67,7%)
		2. Jumlah Satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	40	40	100%	
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	100%	
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi	4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	100%	 Baik
3	Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	5. Jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1	1	100%	 Baik

Pengukuran kinerja diatas dilakukan setiap triwulan. Hal ini sesuai rencana aksi perjanjian kinerja. Kinerja triwulan dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya. Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja telah dibuat sistem *e-performance* BPOM berbasis elektronik pada tahun 2015. Selain itu, *e-performance* mengakomodir pelaporan kinerja tingkat lembaga hingga eselon IV dan kinerja anggaran.

Analisis pencapaian sasaran strategis dan sasaran kegiatan Tahun 2016:

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh nilai SAKIP A
2. Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten

Ketiga indikator tersebut juga sekaligus merupakan **3 dari 5 Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehingga analisis pencapaian dibawah ini merupakan pengukuran realisasi dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2016.**

Indikator 1 :

Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A

Nilai SAKIP unit kerja Badan POM diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2016. Ruang lingkup evaluasi adalah :

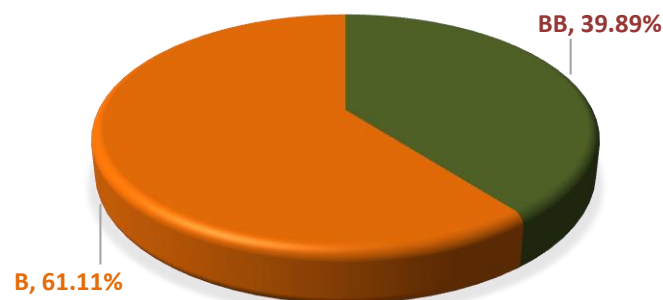
1. Penilaian terhadap pemenuhan dan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang meliputi dokumen Renstra, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta penilaian terhadap keselarasan antar dokumen perencanaan;
2. Penilaian terhadap sistem pengukuran kinerja, termasuk pemenuhan indikator kinerja yang baik berdasarkan peraturan yang berlaku, serta penyajian capaian kinerja dan hasil analisisnya dalam pelaporan kinerja berdasarkan azas-azas cara penyajian informasi yang baik;

3. Penilaian terhadap implementasi evaluasi internal berikut pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi.

Kategori hasil penilaian terhadap SAKIP adalah :

No	Nilai pemenuhan terhadap kinerja	Kategori	Keterangan
a.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
b.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
c.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
d.	> 60 s.d. 70	B	Baik
e.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup Baik
f.	> 30 s.d. 50	C	Agak Kurang
g.	≤ 30	D	Kurang

PROFIL HASIL EVALUASI SAKIP UNIT ESELON II
PUSAT DAN BALAI TAHUN 2016



Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat terhadap 54 unit kerja pusat dan BB/BPOM adalah 21 unit kerja memperoleh predikat BB atau “Sangat Baik” dengan range nilai terendah yaitu 70,13 dan tertinggi 73,65. Sementara itu, 33 unit kerja lainnya berada pada kategori B atau “Baik” dengan range nilai terendah adalah 61,74 dan yang tertinggi 69,87. Hasil

evaluasi ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana tidak terdapat lagi unit kerja dengan predikat CC atau “Cukup Baik”.

Namun capaian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 6 unit kerja memperoleh predikat A. Oleh karena itu pencapaian indikator sasaran strategis ini dikategorikan **“KURANG”** karena **tidak ada unit kerja (0%) yang berhasil mencapai nilai SAKIP A. Dibandingkan dengan capaian indikator ini pada tahun lalu, maka belum ada perubahan.**

Permasalahan dalam Implementasi SAKIP di BPOM adalah :

1. Beberapa sasaran di tingkat unit kerja eselon II/ unit mandiri masih belum sesuai dengan tingkat kewenangan/ fungsi unit kerja.
2. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran/ tujuan bagi unit kerja tertentu masih belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik karena belum cukup untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai. Jumlah indikator tersebut belum memadai untuk menyimpulkan tercapainya tujuan atau sasaran atau kinerja utama.
3. Beberapa target kinerja belum ditetapkan dengan baik berdasarkan data yang memadai.
4. Sistem pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (perhitungan realisasi kinerja masih dilakukan secara manual).
5. Laporan kinerja yang disusun masih terbatas pada pemenuhan kewajiban formal. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/ kegiatan organisasi maupun untuk peningkatan kinerja.
6. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja atau peningkatan kinerja belum seluruhnya dilaksanakan secara memadai.

Saran perbaikan dari Inspektorat:

1. Menyempurnakan dokumen Renstra dengan menginformasikan IKU serta hubungan yang logis antara kegiatan-kegiatan dengan tujuan/sasaran yang akan dicapai.
2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja di tingkat unit kerja sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
3. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja di tingkat unit kerja mengenai analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja serta memanfaatkan informasi kinerja untuk meningkatkan kinerja BPOM secara keseluruhan.
4. Mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan dalam penerapan manajemen kinerja.
5. Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan.
6. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kerja di lingkungan BPOM melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik dan mekanisme *reward and punishment*.

Indikator ini mendukung pencapaian indikator Sekretariat Utama yaitu “Nilai SAKIP BPOM A” yang merupakan indikator level BPOM. Salah satu upaya Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menunjang pencapaian indikator tersebut adalah melalui pembuatan sistem manajemen kinerja yaitu *e-performance* BPOM berdasarkan peta strategis dengan metode *Balanced ScoreCard*.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM” dengan indikator peningkatan unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A, Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyelenggarakan beberapa sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pemahaman unit kerja terhadap SAKIP yaitu :

1. Workshop dan Bimtek SAKIP, yang rutin diadakan setiap awal tahun dengan mengundang perwakilan setiap unit kerja pusat dan Balai.
2. Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis pendekatan *scenario planning*, *scenario network mapping (SNM)* dan *balanced scorecard (BSC)* di awal tahun 2016.
3. Review Rencana Strategis BPOM, Sekretariat Utama dan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019.
4. Pengembangan sistem manajemen kinerja *e-performance* untuk mengukur capaian kinerja mulai dari organisasi, unit kerja sampai dengan level individu.

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat memenuhi target indikator ini pada tahun 2017 adalah :

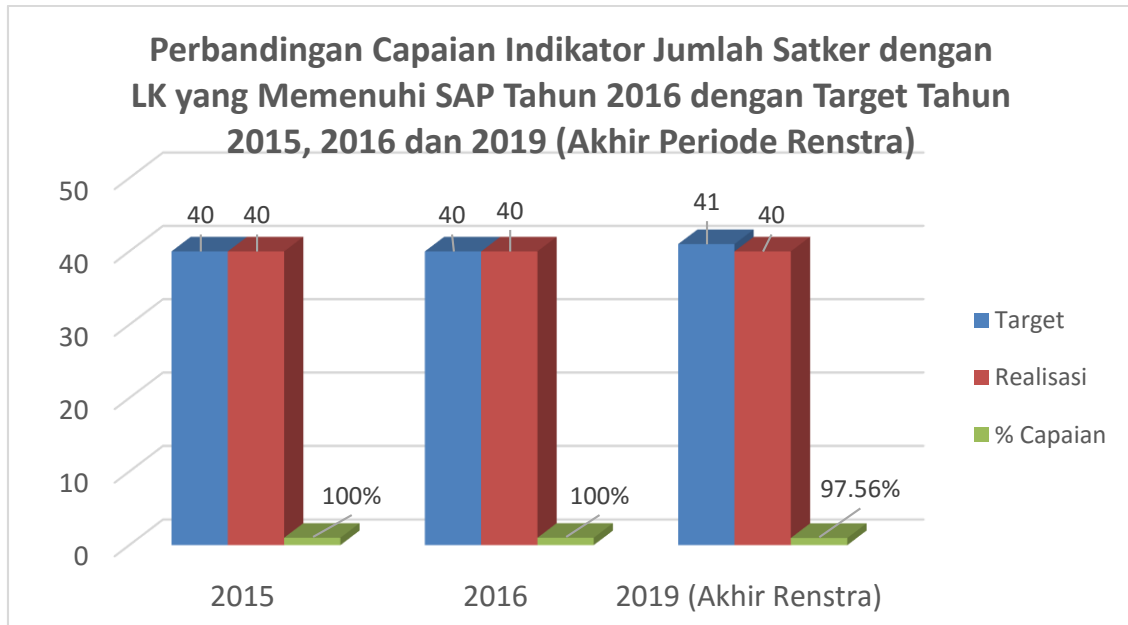
1. Melakukan kegiatan Bimtek dan monitoring implementasi SAKIP di unit-unit kerja terutama BB/ BPOM sejak awal tahun 2017 dengan mengacu kepada hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2016.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkesinambungan dan berkoordinasi dengan personil dari Inspektorat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan yang bertindak sebagai evaluator SAKIP unit kerja pusat dan balai melalui diklat Evaluasi AKIP pada tahun 2017.

Indikator 2:

Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian/ Lembaga, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh BPOM merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada

kesesuaian SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian indikator ini mendukung capaian indikator BPOM yaitu “Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK” dengan target WTP.



Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2016, laporan keuangan Badan POM Tahun 2015 berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa seluruh satker di BPOM telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **“BAIK” (100%)** karena **40 satker di BPOM telah menyusun Laporan Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**. Jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2019 yaitu 41 unit kerja, maka pencapaian indikator ini adalah 97,56%.

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	40	40	100.00%	Memuaskan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator “Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”, Biro Perencanaan menyelenggarakan beberapa sub kegiatan :

1. Bimtek Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyusunan laporan keuangan.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* laporan keuangan BPOM.
3. Konsolidasi laporan keuangan pusat dan balai.
4. Reviu kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
5. Monitoring dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
6. Diklat perbendaharaan dan perpajakan
7. Bimbingan Teknis untuk Bendahara Pengeluaran

Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan selalu melakukan pengawalan dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual serta pelaksanaan rekonsiliasi PNBPN secara berkala dengan unit penghasil PNBPN.

Kendala yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sering terjadi ketidaksesuaian akun baik pada perencanaan maupun pelaksanaan anggaran karena Penyusun rencana, PPK, Bendahara dan penanggungjawab teknis kegiatan belum memahami Bagan Akun Standar.
2. Kesalahan pada penggunaan menu transaksi terutama pada Aplikasi SIMAK

Upaya yang dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya sub kegiatan yang tidak efisien untuk tahun-tahun berikut adalah :

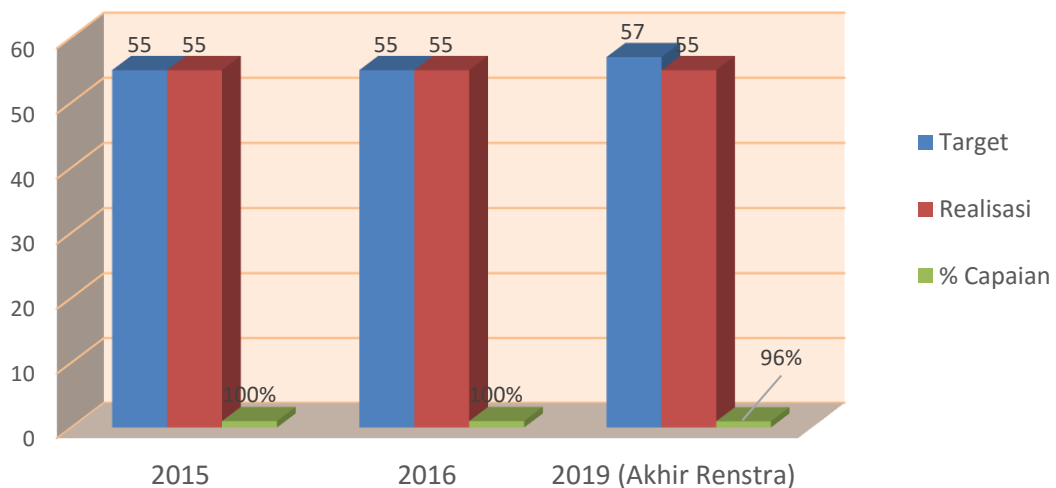
1. Sosialisasi untuk penyusun anggaran, Bendahara, PPK dan Penanggungjawab kegiatan
2. Peningkatan pengetahuan tentang perkembangan sistem/peraturan terbaru melalui diklat/bimbingan teknis/sosialisasi Sistem Akuntansi Akuntansi.

Indikator 3:

Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten

Surveilans QMS ISO 9001 BPOM Tahun 2016 merupakan surveilans pertama untuk periode siklus kedua sertifikasi sejak tahun 2012. Berdasarkan hasil Surveilans QMS ISO 9001:2008 yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober s.d. 5 Desember 2016, diperoleh hasil bahwa seluruh 55 (lima puluh lima) auditan, terdiri atas Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 31 (tiga puluh satu) Balai Besar/ Balai POM dinyatakan dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 atas penerapan QMS secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **“BAIK”** karena **berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan yaitu 55 unit kerja berhasil menerapkan QMS secara konsisten**. Jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2019 yaitu 57 unit kerja, maka pencapaian indikator ini adalah 96,49%. Dibandingkan dengan pencapaian indikator ini pada tahun kedua periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2011 adalah sama yaitu 100%.

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara Konsisten Th 2016 dengan Target Th 2015,2016 dan 2019 (Akhir Periode Renstra)



Keberhasilan BPOM maupun unit-unit kerja di dalamnya dalam mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 selama 5 tahun ini, karena didukung oleh berbagai kegiatan yang

dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2016, sub kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 adalah :

- **Peningkatan Kompetensi Tim *Quality Assurance* QMS BPOM**

Peningkatan Kompetensi Tim *Quality Assurance* QMS BPOM bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Tim QA mengenai konsep bisnis proses QMS BPOM yang merupakan bagian dari program penguatan tata laksana reformasi birokrasi serta pemahaman mengenai perbedaan ISO 9001 versi 2008 dan versi 2015 sebagai dasar upaya BPOM dalam melakukan *upgrading* ISO 9001:2015 yang dijadwalkan tahun 2017.

- **Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 BPOM, melalui kegiatan :**

Tinjauan Manajemen BPOM

Berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008, Manajemen Puncak harus memberikan bukti atas komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dan secara berkelanjutan meningkatkan efektivitasnya dengan melaksanakan Tinjauan Manajemen. Dengan demikian, Tinjauan Manajemen wajib dihadiri oleh Manajemen Puncak. Tinjauan manajemen BPOM merupakan salah satu agenda dalam Rapat Evaluasi Nasional BPOM yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2016. Tinjauan Manajemen merupakan bagian terintegrasi dari proses evaluasi yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM.

Penyusunan SOP Makro BPOM ISO 9001:2015

Pada tahun 2016, BPOM telah melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Surveilans Konversi ISO 9001:2015 yang akan dilaksanakan tahun 2017 terhadap seluruh perangkat sistem, meliputi kaji ulang proses bisnis dan subproses bisnis BPOM, penyusunan dan kaji ulang *cross functional map* (peta lintas fungsi), sosialisasi atau internalisasi serta peningkatan kompetensi *Management Representative* dan Auditor Internal menggunakan ISO 9001:2015, dan penyusunan ulang dokumen SOP Makro. Penyusunan dokumen ulang SOP Makro BPOM disesuaikan dengan persyaratan ISO 9001:2015 dengan tahapan mitigasi risiko berdasarkan peta lintas fungsi BPOM. SOP Makro yang disusun disesuaikan

dengan format berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan :

$$NPS = \{(1 \times 0\%) + (1 \times 100\%) + (1 \times 100\%)\} / 3 = 66.67\%$$

Dari perhitungan NPS diatas disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan adalah "KURANG", karena pencapaian target indikator 1 adalah 0%. Penyebab kegagalan pencapaian tersebut dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi implementasi SAKIP di unit-unit kerja. Pemahaman bahwa SAKIP tidak hanya pada sekedar laporan kinerja saja tetapi merupakan kesatuan sistem yang tidak terpisah mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi serta pelaporan kinerja yang sudah dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 1:

Dihasilkannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan keuangan dan Hasil Evaluasi yang Terintegrasi

Indikator sasaran kegiatan ini adalah **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan**. Indikator ini sekaligus adalah **indikator ke 4 dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan**. Pencapaian indikator sasaran kegiatan ini adalah "**BAIK**" karena **dapat memenuhi 100% target indikator** yaitu tersusunnya 15 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2015. Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 dan target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra

yaitu 15 dokumen, maka pencapaian indikator ini masih 100%. Dibandingkan dengan pencapaian indikator ini pada tahun kedua periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2011 adalah sama yaitu 100%.

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	100%	 Memuaskan

Lima belas dokumen yang berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2016 adalah :

1. Review Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019
2. Review Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019
3. Review Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019
4. Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun 2017
5. DIPA/ POK BPOM Tahun 2017
6. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2016
7. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2016
8. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016
9. Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2015
10. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2015
11. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015
12. Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2015
13. Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015
14. Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2015
15. Laporan Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2015

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan seharusnya menyusun dokumen *Grand Design*. Tujuan penyusunan *Grand Design* adalah untuk

memastikan keberlanjutan program Pengawasan Obat dan Makanan. *Grand Design* merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan, berorientasi hasil, memperhatikan faktor risiko, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, memuat strategi terobosan, dilengkapi dengan target dan perubahan yang harus terjadi, indikator kinerja yang relevan, jelas dan terukur, mencakup *road map* setiap tahunnya, serta kebutuhan ideal anggaran. *Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan profesionalitas manajemen dan kapasitas BPOM, tetapi juga meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, perhatian suprasistem dan keterlibatan berbagai pihak dalam program pengawasan Obat dan Makanan.

Pada awal tahun 2016 telah dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengadaan jasa konsultasi penyusunan *Grand Design* pengawasan Obat dan Makanan dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan PPK dan Pokja ULP Sektama. Akan tetapi kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan di tahun 2016 karena merupakan kegiatan yang dihemat sebagai tindaklanjut kebijakan penghematan anggaran tahun 2016. Dengan demikian, output berupa dokumen *Grand Design* pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat terpenuhi. Sebagai tindaklanjut, kegiatan ini telah dianggarkan kembali pada tahun 2017.

$$NPS = (1 \times 100\%) / 1 = 100\%$$

Dari perhitungan NPS diatas, disimpulkan bahwa pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mencapai Sasaran Kegiatan 1. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini yaitu 15 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, untuk ke depan Biro Perencanaan dan Keuangan akan terus berupaya agar 15 dokumen tersebut selalu meningkat dari segi kualitas.

Sasaran Kegiatan 2:

Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

Indikator sasaran kegiatan ini adalah jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. Indikator ini sekaligus juga merupakan indikator ke 5 dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan. Pencapaian sasaran strategis ini adalah "BAIK" karena dapat memenuhi 100% target indikator yaitu tersusunnya 1 kajian tentang penataan dan penguatan organisasi berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 dan target pada periode akhir Renstra yaitu 1 kajian, maka pencapaian indikator ini tetap 100%.

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokratisasi	1	1	100%	 Memuaskan

Dalam pelantikan Kepala BPOM tanggal 20 Juli 2016, Presiden memberikan arahan agar dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Upaya untuk menindaklanjuti arahan dimaksud diimplementasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi BPOM, yang akan mencabut ketentuan mengenai BPOM dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Rancangan Perpres tentang BPOM di antaranya meliputi pembentukan Deputy Bidang Kewaspadaan dan Penindakan serta peningkatan unit pengawas intern setingkat

Inspektorat Utama. Pembahasan Rancangan Perpres tentang BPOM dilaksanakan secara internal dan eksternal dengan Kementerian PANRB dan Sekretariat Kabinet pada bulan September s.d. November 2016. Dilanjutkan dengan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) yang melibatkan Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan tanggal 24 November 2016.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk Sasaran Kegiatan 2 Biro Perencanaan dan Keuangan:

$$NPS = (1 \times 100\%) / 1 = 100 \%$$

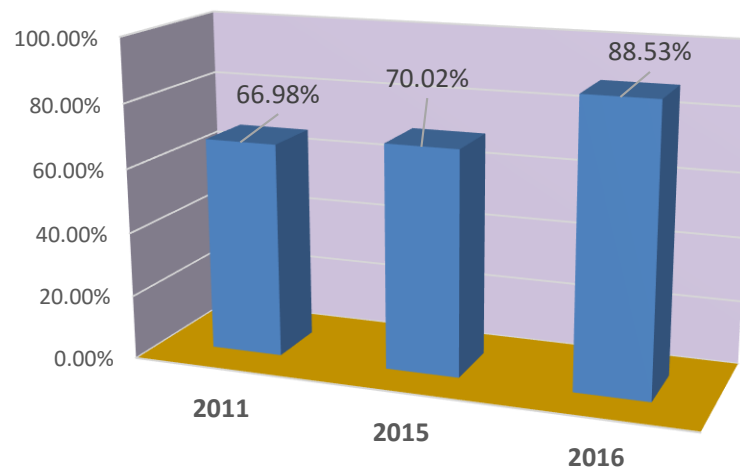
Dari perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran tersebut, disimpulkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mencapai Sasaran Kegiatan 2, yaitu Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat menyusun kajian-kajian yang akan dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan lebih baik.

III.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas *Meeting/* Konsinyering Kementerian dan Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016, pada tanggal 12 Mei 2016 maka anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan berkurang dari Rp 47.000.000.000,- menjadi Rp 35.825.963.000,-. Pada tanggal 8 Agustus 2016, Presiden melalui Inpres nomor 8 Tahun 2016 kembali menginstruksikan masing-masing Kementerian/ Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/ kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir

mandiri (*self blocking*). Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan yang ikut diblokir mandiri adalah sebesar Rp 4.994.707.000,- sehingga sisa pagu yang bisa dimanfaatkan untuk tahun 2016 adalah Rp 30.831.256.000,-, Sementara itu, realisasi anggaran (netto) Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2016 berdasarkan Sistem Online Monitoring Sistem Perebendaharaan dan Akuntansi Negara (OMSPAN) adalah Rp 27.296.796.630,- atau 88,54%. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 70,60%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun kedua periode Renstra 2010-2014, yaitu tahun 2011, realisasi tahun ini lebih tinggi 21,55%.

**% Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2011, 2015, 2016**



Berikut adalah realisasi anggaran (sebelum dikurangi pajak) tahun 2016 per sasaran strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan :

No	Sasaran Startegis/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	9,455,302,000	7,995,933,913	84.57
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	20,361,089,000	18,394,136,017	90.34
3	Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1,014,865,000	906,723,700	89.34

Dari 78 sub kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2016 terdapat 5 sub kegiatan yang tidak terlaksana di Biro Perencanaan dan Keuangan dikarenakan adanya kebijakan blokir mandiri anggaran yaitu :

1. Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I (DKE)
2. Sosialisasi Proses Bisnis Akuntansi Berbasis Akrual untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Penyusunan *Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan
4. Focus Group Discussion Perbendaharaan
5. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal Biro Perencanaan dan Keuangan, unit kerja lain di lingkungan BPOM, dan K/L terkait (Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR, dan lain sebagainya).
2. Menetapkan POA dan penanggung jawab kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA tersebut.
3. Melakukan pemantauan capaian target kinerja dan realisasi anggaran secara berkala.
4. Segera melakukan revisi apabila dari hasil pemantauan diketahui ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Menyelenggarakan kegiatan baru yang lebih berdaya ungkit.
6. Menetapkan target dan alokasi anggaran berdasarkan tren data capaian target dan realisasi beberapa tahun terakhir.
7. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan Barang/ Jasa sesegera mungkin yaitu pada triwulan I tahun anggaran.

III.3. TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN

Dalam mengevaluasi kinerja harus dilakukan pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan yang difokuskan pada pengukuran *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Meskipun pengukuran tingkat efisiensi kegiatan tidak diminta pada format Laporan Kinerja KemenPAN dan RB, namun Biro Perencanaan dan Keuangan tetap melakukan evaluasi tingkat efisiensi sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Rincian penghitungan efisiensi sub kegiatan tahun 2016 disampaikan pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Dibandingkan dengan evaluasi kinerja tahun 2015, maka pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah sub kegiatan yang terhitung Tidak Efisien yaitu dari 3 sub kegiatan menjadi 1 sub kegiatan.

1 sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang terhitung tidak efisien yaitu Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan di BB/ BPPOM. Hal ini dikarenakan target Balai Besar/Balai POM yang diasistensi cukup banyak, sedangkan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Padatnya agenda RDP dengan Komisi IX DPR RI
- b. Adanya kebijakan pemotongan dan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan
- c. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2017 dengan pola baru.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun demikian, dari sisi realisasi anggaran telah lebih dari 85%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa Balai POM membutuhkan asistensi lebih dari 1 kali.

Dikarenakan adanya penghematan anggaran tahun 2016, terdapat kegiatan yang tingkat efisiensinya mencapai 24,12 yaitu kegiatan Diseminasi Kebijakan Eselon I. Anggaran kegiatan tersebut dihemat dari Rp 1.231.120.000,- menjadi Rp 50.000.000,- sehingga yang

bisa direalisasikan hanya pencetakan Buku Prosiding Diseminasi Kebijakan Eselon I tahun 2015, sementara kegiatan pembinaan yang sedianya dilaksanakan oleh Pejabat eselon I ke BB/BPOM ditiadakan.

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan :

1. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akuntabilitas program/ kegiatan pada tahun 2015 yang berupa perbaikan perencanaan tahun 2016 dan tahun 2017.
2. Tindak lanjut dari hasil evaluasi program/ kegiatan berupa perbaikan kinerja, terbukti penilaian evaluasi akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan yang meningkat dari nilai 61.58 (predikat B) pada tahun 2015 menjadi 71.45 (predikat BB) pada tahun 2016.